

# **BANDAR MAULANA**

Jurnal Sejarah Universitas Sanata Dharma

Efek Perubahan Konstelasi Kekuasaan di Yogyakarta

**P.M. Laksono**

YOGYAKARTA dari Kontinuitas ke Perubahan

**H. Purwanta**

Etika Politik dan Kekuasaan di Bidang Pendidikan  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta

**Y. B. Adimassana**

Yogyakarta City in Transformation Process  
The Dinamic Relations Between State and Society

**B. Setiawan**

Enculturation of Catholicism and Javanese Culture ;  
Case the Chruch of the Holy Heart of Jesus, Ganjuran  
Bantul, Yogyakarta Special Region

**Silverio R. L. Aji Sampurno**

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Efek Perubahan Konstelasi Kekuasaan di Yogyakarta PM Laksono .....	1
<b>YOGYAKARTA Dari Kontinuitas ke Perubahan</b> <b>H. Purwanta</b> .....	14
Etika Politik Dan Kekuasaan Di Bidang Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta <b>Y.B. Adimassana</b> .....	31
Yogyakarta City In Transformation Process: The Dynamic Relations Between State And Society <b>B. Setiawan</b> .....	42
Enculturation of Catholicism and Javanese Culture; <del>Case the Church of the Holy Heart of Jesus, Ganjuran,</del> Bantul, Yogyakarta Special Region <b>Silverio R. L. Aji Sampurno</b> .....	71

## Efek Perubahan Konstelasi Kekuasaan Di Yogyakarta<sup>1</sup>

PM Laksono<sup>2</sup>

### Totalitas Kerajawian Jawa dalam Rentang Sejarah

Lebih dari 20 tahun yang lalu, dari pendekatan strukturalisme dan dengan mempertimbangkan dimensi transenden/teoretik, imanen/praksis, saya menemukan bahwa kerajawian Jawa itu paradoksal (Laksono 1985). Dengan kata lain konsep kerajawian Jawa itu memuat ambivalensi. Jadi ia juga mewakili pengertian *suwung awang uwung*, suatu totalitas yang tidak terperikan. Demikianlah totalitas itu juga sering dirumuskan dalam ungkapan *manunggaling kawula lan gusti*, menyatunya rakyat dan tuannya. Dalam dunia perwayangan totalitas itu dapat ditemukan dalam diri Semar. Orang Jawa pun kemudian antara lain mengidam-idamkan seorang raja Jawa harus mampu mengemban atribut itu untuk mewujudkan *tata tentrem* dalam tugas bina negaranya. Oleh karenanya raja memerlukan kasekten atau kekuatan mistik yang amat sangat diperlukan pada saat-saat kritis karena ada acaman dari kekuatan luar termasuk yang berasal dari kekuatan supra alami. *Babad Tanah Djawi* misalnya menuturkan bagaimana kasekten itu dibayangkan pada waktu G. Merapi meletus tahun 1672 (1594 Syaka):

“Pada waktu itu bersamaan dengan menyalanya gunung Merapi, terdengar suara menggelegar menyeramkan. Batu-batu besar beradu menimbulkan api. Seperti hujan api saja tampaknya. *Ladu* mengalir turun lewat kali.

<sup>1</sup>Disampaikan dalam Seminar Sehari Menyambut 250 Tahun Kota Yogya, , Pusat Studi Sejarah Indonesia (Indonesiana) dan Pusat Sejarah dan Etika Politik (Pusdep), Universitas Sanata Dharma, 15 Agustus 2006.

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Antropologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**YOGYAKARTA**  
**Dari Kontinuitas ke Perubahan\***  
**Oleh H. Purwanta\*\***

**A. Pendahuluan**

Pada tanggal 27 Mei 2006 lalu satu peristiwa tragis terjadi. Gempa bumi menghentak Yogyakarta dan menghancurkan puluhan ribu rumah serta menelan ribuan korban nyawa di Kabupaten Bantul. Masyarakat kini menjalani kehidupan dengan tinggal di tenda-tenda dengan tinggal menerima satu pilihan, yaitu *nrimo*, sebuah sikap untuk menerima peristiwa memilukan itu sebagai realitas hidup yang harus dijalani.

Dari perspektif historis, kehancuran yang dialami oleh masyarakat Bantul dan sekitarnya, dapat dimaknai sebagai simbol akan hilangnya mata rantai kebudayaan yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara masa kini dan masa lalu. Sejarah seharusnya memiliki dua unsur, yaitu kontinuitas dan perubahan, yang terbingkai oleh waktu. Melalui kontinuitas, sejarah menarasikan berbagai unsur kehidupan dari masa lampau yang tetap dipertahankan oleh masyarakat masa kini sebagai identitasnya. Di lain pihak, perubahan menarasikan berbagai unsur kehidupan yang diubah oleh masyarakat, baik akibat pengaruh luar maupun penemuan sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Hilangnya ingatan kolektif terhadap masa lampainya merupakan indikasi bahwa narasi yang selama ini diproduksi lebih menampilkan perubahan.

---

\*Tulisan ini disampaikan pada Seminar 250 Tahun Yogyakarta yang diadakan oleh Pusat Studi Sejarah Indonesia dan PUSdEP Universitas Sanata Dharma pada tanggal 15 Agustus 2006.

\*\*Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma.

Salah satu contoh dominasi wacana perubahan yang dapat disimak dari area gempa bumi adalah konstruksi rumah. Secara turun temurun masyarakat Yogyakarta mengembangkan teknologi kayu sebagai hasil terbaik dari dialog dengan alam. Akan tetapi ingatan kolektif akan teknologi kayu dengan sangat kuat dihapus oleh wacana perubahan dengan menciptakan simbol bahwa rumah kayu termasuk kategori tidak permanen yang dimaknai sebagai miskin, sedang rumah tembok dikategorikan sebagai bangunan permanen dan dimaknai sebagai kaya. Pendiskreditan teknologi kayu mendorong masyarakat untuk mengubah konstruk pikir mereka tentang bangun rumah yang baik sekaligus menghapus ingatan masa lampau mereka dan menggantinya dengan teknologi tembok.

Dari contoh kasus masyarakat Bantul tampak bahwa meski secara teoritis kontinuitas dan perubahan dapat menjadi roh dari sebuah narasi. Akan tetapi dalam prakteknya, terutama di Yogyakarta, seringkali keduanya memproduksi dua narasi yang berbeda dan bahkan bertentangan. Tarik ulur antar kedua kubu membuahkan berbagai peristiwa sejarah yang kompleks.

Pada tulisan ini, saya mencoba untuk menelusuri kembali jejak-jejak dialektika antara kontinuitas dengan perubahan, terutama dari perspektif budaya. Dengan bertitik tolak dari predikat Yogyakarta sebagai kota budaya, permasalahan yang hendak dilontarkan sebagai fokus pembicaraan adalah bagaimana predikat itu dapat diperoleh dan masih layak serta pantaskah predikat itu disandang.

**B. Akar Budaya Yogyakarta**

Kebudayaan sebagai hasil karya, karsa, rasa dan cipta manusia dalam menanggapi dinamika kehidupan, termasuk di

dalamnya dinamika lingkungan geografis. Clifford Geertz menggambarkan Pulau Jawa, tentu saja termasuk Yogyakarta, sebagai perpaduan sempurna dari empat unsur inti kehidupan, yaitu tanah, air, api dan angin.<sup>1</sup> Perpaduan ini menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu tempat ideal bagi berkembangnya kehidupan.

Keistimewaan kondisi geografis mendasari bagi lahirnya kebudayaan yang bermuara pada keyakinan bahwa semesta bekerja tanpa kurang suatu apapun dan pada tahap selanjutnya menumbuhkan pola hidup yang menjunjung tinggi keharmonisan. Salah satu aspek penting untuk menjaga keharmonisan adalah adanya sistem politik yang memadai. Dalam masyarakat nusantara pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya, paling tidak ada dua unsur kebudayaan yang menjadi akar dari sistem politik yang pernah tercipta adalah penghormatan pada orang tua dan kekerabatan.

Penghormatan kepada orang tua didasarkan pada kesadaran akan asal-usul diri. Setiap orang menjadi ada karena bersatunya orang tua yang sering disimbolkan dengan lingga-yoni. Selain masalah eksistensial, penghormatan didasarkan pada pengalaman bahwa orang tua menjadi figur sentral dalam menjaga ketenteraman dan kerukunan seluruh anggota keluarga, baik dalam arti fisik maupun batin.

Penghormatan diekspresikan dengan sikap patuh dan taat dari anak kepada orangtuanya. Kepatuhan tersebut diberikan oleh anak dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua selalu baik bagi anak. Wacana ini diperkokoh dengan ungkapan *ora ana macan sing tegel mangsa gogore dhewe* (Tidak ada macan yang tega memakan anaknya sendiri). Penghormatan kepada orang tua dilakukan tidak hanya saat masih hidup, tetapi

---

<sup>1</sup> Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983. Terjemahan.

juga ketika sudah meninggal. Berbagai upacara dari penguburan sampai 1000 hari merupakan bentuk penghormatan yang dikenal luas oleh masyarakat Yogyakarta.<sup>2</sup>

Bangun organisasi keluarga pada tahap selanjutnya berkembang menjadi bangun politik. Hubungan penguasa – rakyat dipandang seperti hubungan orang tua – anak. Pemimpin/ penguasa ditempatkan sebagai orang tua dari masyarakat di wilayah kekuasaannya. Seajar dengan itu, kriteria pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki sifat-sifat kebapakan. Sebaliknya, kriteria masyarakat yang baik adalah mereka yang taat dan berbakti kepada pemimpin.

Selain penghormatan kepada orang tua, unsur lain yang ikut mewarnai budaya politik Yogyakarta adalah nilai kekerabatan. Nilai kekerabatan merupakan keyakinan bahwa hidup yang terbaik adalah menempatkan orang lain sebagai kerabat atau saudara. Kehidupan berlandas nilai kekerabatan antara lain tersimbolkan dengan penyebutan "*Simbah, Pakde, Budhe, Paklik, Bulik*" dan sebagainya kepada tetangga, meski tidak memiliki ikatan darah. Bahkan pada perkembangannya, nilai tersebut mengkristal pada pepatah yang menyatakan bahwa tetangga merupakan kerabat yang terdekat (*tangga iku sedulur sing paling cedhak*).<sup>3</sup>

Kekerabatan menjadi sumber bagi berbagai aspek kehidupan, seperti gotong-royong, tolong-menolong, dan bahkan dalam pengelolaan

---

<sup>2</sup> Bandingkan dengan Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hlm 41 – 47. Penghormatan kepada orang tua dipandang menjadi unsur budaya khas nusantara sejak masa pra sejarah, dengan bukti ditemukan kubur batu di berbagai tempat.

<sup>3</sup> Bandingkan dengan Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, hlm. 17 – 18.

ekonomi. Secara etis, kekerabatan menjadikan masyarakat menabukan eksploitasi terhadap pihak lain. Bahkan sebaliknya, kepentingan orang lain dan bersama ditempatkan lebih tinggi dari pada kepentingan individu.

### C. Periode Mataram

Secara formal Yogyakarta pada tahun 1558 menjadi wilayah yang dihadiahkan oleh Raja Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan dan anak keturunannya yang kemudian membangun kerajaan Mataram. Sampai puncak kejayaannya, yaitu saat tahta dipegang oleh Sultan Agung, dinasti Mataram menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan. Dari sudut pandang ini, secara kultural masyarakat Yogyakarta menjadi pewaris dan pemilik kebudayaan terbaik Mataram. Paling tidak ada tiga fenomena kultural yang diproduksi dan diwariskan selama Mataram berpusat di Yogyakarta, yaitu:

#### 1. Identitas Kejawaan

Fenomena pertama adalah penggunaan kebudayaan Jawa sebagai identitas. Fenomena ini menarik karena sejak Demak berdiri dan berhasil mengalahkan Majapahit, Islam menjadi simbol yang diproduksi oleh para penguasa di Jawa. Oleh karena itu, penggunaan kebudayaan Jawa sebagai identitas pada periode Mataram lebih merupakan usaha penghidupan kembali kebudayaan lokal di tengah dominasi kebudayaan Islam yang semakin kuat. Penghidupan kembali itu antara lain dengan pembuatan makam raja-raja di Imogiri sebagai simbol penghormatan kepada orang tua/leluhur. Selain itu, pada tahun 1633 Kerajaan Mataram juga mengeluarkan penanggalan baru yang dinamai penanggalan Jawa. Sistem penanggalan yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Sultan Agung itu merupakan penggabungan

antara sistem penanggalan Saka dan Arab, sehingga penamaan sebagai penanggalan Jawa dapat dimaknai sebagai usaha pemberian kebanggaan terhadap identitas kejawaan. Dengan sistem penanggalan itu hendak disampaikan pesan bahwa orang Jawa juga pandai.

Tidak jarang, usaha penghidupan kembali identitas kejawaan tersebut secara mencolok berbenturan dengan tradisi Islam sebagai narasi besar saat itu, seperti pengembangan kerajinan dengan bergambar makhluk hidup.<sup>4</sup> Perbenturan tidak hanya terbatas pada narasi kerajinan, tetapi juga fisik. Fokus penaklukan Mataram ke Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya, karena Jawa Timur menjadi pusat penyebaran Agama Islam.

#### 2. Tata krama.

Narasi penghidupan kembali kebudayaan Jawa juga tampak aspek pembakuan tata krama (sopan santun). Penghormatan terhadap orang tua memperoleh bentuk yang relatif baku dalam format bahasa tubuh dan bahasa tutur pada periode Mataram. Bahasa tubuh diformalkan oleh dinasti Mataram seperti membungkuk saat bertemu orang yang lebih tua atau pemimpin, sedikit menunduk saat berbincang agar mata tidak saling bertatapan dengan lawan bicara yang lebih tua dan berjalan jongkok serta menyembah saat menghadap bangsawan tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> G. Moedjanto, *The Concept of Power in Javanese Culture*. Gadjah Mada University Press, 1986, hlm. 24.

<sup>5</sup> Berjalan jongkok juga digunakan oleh sinoman saat mengantarkan minum dan kudapan bagi para tamu dalam suatu perhelatan. Tradisi ini sampai sekarang, meski sudah jarang, masih dapat ditemukan di pedesaan Yogyakarta.

Selain bahasa tubuh, tata krama juga mencakup bahasa tutur. Pada periode Mataram, yaitu sejak masa pemerintahan Sultan Agung, dikembangkan dengan dua model bahasa tutur, yaitu krama dan ngoko.<sup>6</sup> Bahasa *krama* digunakan untuk berkomunikasi dengan kaum yang lebih tua, orang tua atau pemimpin, sebagai simbol penghormatan. Selain itu, bahasa krama juga digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal. Oleh karena sebagai manifestasi penghormatan, bahasa Jawa krama dikenal sebagai bahasa halus. Model ke dua adalah bahasa Jawa ngoko yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kaum seusia atau sederajat, sebagai simbol hangatnya kekerabatan.

### 3. Konsep keagung-binatharaan

Aspek ketiga yang dinarasikan oleh Mataram adalah konsep kekuasaan khas Jawa yang dikenal sebagai konsep keagung-binatharaan. Keagung-binatharaan berasal dari dua kata, yaitu agung yang berarti mulia dan bathara yang dalam konteks ini diartikan sebagai Tuhan khas nusantara.<sup>7</sup> Keagung-

---

Tradisi ini sampai sekarang, meski sudah jarang, masih dapat ditemukan di pedesaan Yogyakarta.

<sup>6</sup> Pada masa-masa selanjutnya, bahasa Jawa krama semakin kompleks dengan perbedaan antara krama, madya dan ngoko. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Sarining Paramasastra Djawa*. Djakarta, 1953 yang dikutip oleh G. Moedjanto, *ibid. hlm. 56*.

<sup>7</sup> Sampai saat tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan referensi yang memuat penjelasan secara memuaskan tentang konsep bathara. Dalam berbagai karya masyarakat Indonesia, gambaran tentang bathara telah mengalami bias dengan konsep dewa agama Hindu (Bathara Wisnu, Bathara Siva dll) dan Allah/Tuhan dari agama samawi. Penjelasan yang relatif memadai justru diperoleh dari masyarakat Philipina yang menempatkan Bathara sebagai yang tertinggi: ... The Creator God was almost always said to be invisible, or without form, and as such, images of the deity were not generally made.

binatharaan merupakan konsep kekuasaan ideal khas masyarakat nusantara, khususnya Jawa. Konsep dapat ditelusuri dari keyakinan bahwa semesta bekerja sangat sempurna, sehingga semua kebenaran semesta ditempatkan sebagai kebenaran sempurna. Dari sudut pandang ini, raja ideal adalah penguasa yang mampu bertindak seperti semesta yang selalu memiliki sifat *ber budi bawa lekšana, ambeg adil para marta*. Sifat agung bagai bathara itu sangat ditekankan baik dalam dunia pewayangan maupun karya sastra istana, karena diharapkan raja akan selalu ingat bahwa tugas utamanya adalah menjadi orang tua bagi seluruh rakyat.<sup>8</sup> Apabila rakyat diandaikan kerangka dan raja diandaikan bilah keris, maka harmoni hanya akan tercipta apabila *curiga manjing warangka*. Sebaliknya, hanya bencana yang akan terjadi apabila bilah keris berada di luar kerangkanya. Raja dan rakyat harus merupakan satu kesatuan yang lebih dikenal sebagai konsep *manunggaling kawulo-gusti*.

---

The name was considered sacred, and very rarely uttered... This same phenomenon occurs widely throughout the Malay Archipelago. Generally, the Supreme God was seen as distant and too involved in higher matters for direct worship. Instead, a lower class of deities, who, like humans, were also created, were the principle objects of prayer, supplication and ritual. However, sacrifices, offerings and rituals aimed at the Supreme God were unknown ... The lower gods were known by names like *diwa, diwata, tuhan and anito*. As in many shamanistic cultures, these deities were divided into benefic and malefic categories. Lihat pada <http://www.geocities.com/tokyo/temple/9845/spirit.htm>

<sup>8</sup>Sultan HB X berpendapat bahwa seorang sultan seharusnya tidak lagi memiliki ambisi apa pun, kecuali senantiasa hanya bagi kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa kekuasaan Jawa itu sebenarnya berintikan pengayom (pelindung) dan pengayem (membuat tenteram) rakyat. Pemimpin (raja) tidak boleh mengedepankan pamrih dan nafsu manusianya. Lihat Kompas, 16 Februari 2004.

Kondisi ideal, yaitu menjadi raja yang *agung-binathara*, sangat sulit diwujudkan menjadi realitas. Sebaliknya, yang seringkali terjadi justru raja menampakkan sifat-sifat negatif (lalim, berkepribadian lemah dll), sehingga dalam narasi rakyat kecil muncul istilah “*kemratu-ratu*” yang menunjuk sifat mau menang sendiri. Akibatnya tidaklah aneh apabila konsep *agung-binathara* dimaknai secara fisik sebagai “*the owner of everything in the world; not only the owners of a country or of property, but also the owners of one's very life*”.<sup>9</sup> Sebaliknya posisi rakyat digambarkan sebagai *lir slangkrah mungging jaladri* (bagaikan sampah di tengah lautan). Terhadap raja yang demikian, barangkali lebih tepat untuk menggunakan sifat yang digambarkan oleh Serat Wulangreh sebagai *adigang adigung adiguna*.<sup>10</sup>

Sulitnya meraih kondisi ideal tersebut melahirkan banyak karya sastra yang berisikan nasehat-nasehat tentang bagaimana menjadi raja yang baik, seperti *Serat Wedhatama* karya Mangkunegara IV dan *Serat Wulangreh* karya Paku Buwana IV. Nasehat itu antara lain bahwa seorang ksatria:

... *kudu anteng jatmika ing budi, ruruh sarwa wasis samubarangipun. Lan den nedya prawira ing batin nanging*

---

<sup>9</sup> Lihat G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 102. Bahkan ditambahkannya pada catatan kaki bahwa raja dengan mudah dapat menjatuhkan hukuman. Dicontohkannya kasus Sultan Agung menjatuhkan hukuman mati kepada para panglima perangnya atas kegagalan mereka ketika menyerang Batavia.

<sup>10</sup> Adigang sifat kijang, adigung sifat gajah dan adiguna sifat ular. Secara keseluruhan istilah itu untuk menggambarkan orang yang menyombongkan kekuasaannya.

*aja katon, sasabara yen durung mangsane, kekendelan aja wani mingkis, wiweka ing batin den sama den semu*<sup>11</sup>.

#### D. Periode Kasultanan Yogyakarta

Sepeninggal Sultan Agung, Mataram mengalami disintegrasi dan mencapai puncaknya pada pembagian wilayah Mataram menjadi dua:

Perjanjian Giyanti (Palihan Nagari) pada hari Kamis Kliwon, tanggal 29 Rabiulakhir, wuku Langkir, Be 1680 tahun Jawa atau tanggal 13 Februari 1755. Pada saat itu nama Ngayogyakarta Hadiningrat disebut sebagai tempat kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono I, namun secara fisik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai inti dari Kota Yogyakarta belum belum dibangun. Sebulan kemudian pada hari Kamis Pon, 29 Jumadilawal, Be 1680 tahun Jawa, wuku Kuruwelut atau tanggal 13 Maret 1755 Sri Sultan Hamengkubuwono I memproklamirkan bahwa separo dari Negara Mataram yang dikuasanya diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta. Tanggal ini (khususnya tanggal, bulan dan tahun Jawa) dinyatakan sebagai Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Proklamasi hadeging nagari dalem tersebut dilaksanakan di pesanggrahan ambarketawang....

Pada hari Kamis Pon tanggal 3 Sura, Wawu 1681 tahun Jawa, wuku Kuruwelut atau tanggal 9 Oktober 1755 Sri Sultan Hamengku Buwono I memerintahkan untuk membangun Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat di desa Pacethokan

---

<sup>11</sup> Kutipan diambil dari Serat Wulangreh, pupuh mijil yang terdapat pada Aloys Budi Purnomo, “Mewarisi Kualitas Kepahlawanan”. *Kompas*, 10 November 2004.

dalam hutan Beringan. Setahun kemudian tepatnya pada hari Kamis Pahing 13 Syura, Jimakir 1682 tahun Jawa, wuku Julungwangi atau tanggal 7 Oktober 1756 Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarganya memasuki Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang baru dan untuk sementara menempati gedhong sedhahan. Peristiwa pindahnya Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarganya dari Ambar Ketawang ke Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ini ditandai dengan candra sengkala memet Dwi Naga Rasa Tunggal, berupa dua ekor naga yang kedua ekornya saling melilit yang diukirkan diatas banon/renteng kelir baturana kagungan dalem regol kemagangan dan regol gadhung mlathi.<sup>12</sup>

Dinasti Hamengku Buwono menjadi pewaris berbagai unsur kebudayaan yang dikembangkan oleh Mataram, khususnya masa Kotagede dan Pleret. Salah satunya adalah menjadikan kebudayaan Jawa sebagai identitas kolektif. Tata krama, baik dalam bahasa tutur maupun bahasa tubuh, disosialisasi ke seluruh pelosok Kasultanan.

Berbeda dengan Mataram periode Sutawijaya - Sultan Agung yang menempatkan diri sebagai pejuang kontinuitas kebudayaan lokal dan menempatkan Islam sebagai simbol perubahan yang hendak ditolak, Kasultanan Yogyakarta sebagai penerus kebudayaan Jawa justru lebih menaruh perhatian pada tekanan yang dilakukan Barat. Islam tidak lagi ditempatkan sebagai ancaman, karena kekuatan mereka di Jawa secara politik telah hancur pada masa Sultan Agung dengan tersimbolkan pada penguasaan seluruh Jawa Timur.

<sup>12</sup> Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta. Lihat juga *Serat Kuntharatama* karya G.P.H. Buminaya. Yogyakarta, 1958.

Perbedaan antara Mataram awal dengan Kasultanan Yogyakarta juga terdapat pada strategi perlawanan. Mataram sejak awal menggunakan strategi penaklukan fisik, dalam arti menyerang dan menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam. Tampaknya Kasultanan tidak dapat mengambil konfrontasi fisik sebagai strategi, karena secara militer diperhitungkan akan mengalami kekalahan. Jalan perjuangan yang ditempuh untuk tetap mempertahankan kebudayaan Jawa adalah sedapat mungkin mengurangi tekanan dari Barat, baik melalui penolakan, distorsi maupun deviasi terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Salah satu perlawanan yang dilakukan oleh Sultan HB I adalah dengan menolak hadir dan tidak mengirimkan utusan untuk mengucapkan selamat pada setiap pergantian gubernur jendral. Ketidakhadiran itu merupakan simbol ketidakbersediaan Yogyakarta mengakui eksistensi gubernur jendral sebagai pihak yang lebih berkuasa.<sup>13</sup>

Melalui tindakan-tindakan simboliknya Kasultanan menjaga semangat perjuangan untuk menghidupkan identitas kejawaan. Dalam perspektif ini, perlawanan fisik terhadap pemerintah kolonial seperti yang dilakukan Raden Rangga (1810) pada masa pemerintahan Sultan HB II, Pangeran Diponegoro (putra Sultan HB III) (1825 – 1830) dan buruh tebu di Bantul (1882) menjadi ikon-ikon penting terhadap tetap bertahannya semangat perlawanan terhadap tekanan Barat.

Perlawanan juga dilakukan ketika pengaruh Barat semakin merasuki relung Yogyakarta pada abad XX. Persekolahan Barat yang oleh pemerintah kolonial ditujukan untuk mencetak tenaga kerja administratif, oleh Kasultanan dimanfaatkan untuk mewariskan berbagai nilai yang menjadi pandangan hidup masyarakat Yogyakarta. Hasil proses ini adalah generasi baru yang unik, yaitu kaum intelektual

<sup>13</sup>Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern: 1200 – 2004*. Terjemahan. Jakarta: Serambi, 2005, hlm 231 – 232. Dia menempatkan Sultan HB I sebagai raja Jawa terbesar setelah Sultan Agung. (hlm. 236)

yang memahami dan melaksanakan *unggah-ungguh* dalam kehidupan kesehariannya. Salah satu simpul penting hasil dialektika budaya lokal dengan persekolahan Barat adalah lahirnya Tamansiswa yang menempatkan guru sebagai pamong.

Sultan Hamengku Buwana IX menjadi salah satu ikon penting perjuangan mempertahankan identitas kejawaan di Yogyakarta pada abad XX yang sampai sekarang masih lekat menjadi kebanggaan masyarakat.<sup>14</sup> Dia dipahami oleh masyarakat sebagai raja yang agung binathara dalam arti sesungguhnya. Dengan komitmennya menyerahkan tahta untuk rakyat, HB IX mampu meminimalisasi keakuan diri, sehingga mampu menjadi orang tua bagi seluruh rakyat Yogyakarta. Periode pemerintahannya dikenang secara romantis oleh masyarakat sebagai masa penuh keindahan yang disimbolkan sebagai *manunggaling kawulo-gusti*, rakyat dengan pemimpinnya. Istana menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kebudayaan *adi luhung*, sehingga Yogyakarta dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai kota budaya.

#### E. Dari Orde Baru

Tahap penting perkembangan kebudayaan masyarakat Yogyakarta terjadi sejak masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa sebelumnya, keistimewaan Yogyakarta dihargai oleh para pemimpin Indonesia sebagai identitas lokal. Bahkan secara nasional politik identitas menjadi narasi yang kuat, sehingga Yogyakarta ditempatkan sebagai contoh kesuksesan daerah dalam mempertahankan identitasnya. Politik identitas yang dilakukan

---

<sup>14</sup> Lihat G. Moedjanto, *Sukarno, Hatta dan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Dokumentasi Sejarah Indonesia Universitas Sanata Dharma, 2003.

bertujuan untuk mengembangkan perasaan bangga sebagai bangsa, sebagaimana tampak pada model penulisan sejarah:

*The Indonesian nation-state is relatively young, as is the historiography that underpins its formation. Common historical accounts trace the development of Indonesian nationalist historiography to pre-war anti-colonial, historical-literary works and speeches of early nationalists like Muhammad Yamin, Sanusi Pane, and Sukarno (Reid 1979; Sartono 1982; Abdullah and Surjomihardjo 1985). Only few of these were historical in form and intent, but the ideas propounded in them unmistakably found their way into the bedrock of nationalist historiography whose development gained impetus under the aegis of Japanese occupation (Klooster 1982). In the years following independence, the fiercely anti-colonial atmosphere furthered the development of such historiography. In due time, it assumed a position of orthodoxy that ensured a lasting impact on the future course of Indonesian writing. It was perhaps Muhammad Yamin's works (1950; 1953) that best exemplify the general character of this early stage – romantic, ultra-nationalistic, and some would say pre-scientific. This kind of historiography may have become quickly dominant...<sup>15</sup>*

Dari kutipan tersebut, kiranya pengkategorian sebagai *ultra-nationalistic* dan *pre-scientific* perlu digarisbawahi, karena pada Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957 Soedjatmoko menjadi

---

<sup>15</sup> Rommel Curaming, *Towards Reinventing Indonesian Nationalist Historiography* yang dimuat pada [HTTP://KYOTOREVIEW.CSEAS.KYOTO-U.AC.JP/ISSUE/ISSUE2/ARTICLE\\_245.HTML](http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue2/article_245.html)

tokoh yang menggunakannya sebagai kritik terhadap penulisan sejarah model M. Yamin. Soedjatmoko mengingatkan akan bahaya yang menghadang apabila sejarah digunakan sebagai proyek pengembangan nasionalisme. Dia menekankan pentingnya penggunaan metodologi sejarah secara ketat, agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Seminar tahun 1957 menjadi penanda penting pudarnya politik identitas dan digantikan dengan narasi baru yang lebih ilmiah (baca: lebih sesuai dengan pola pikir Barat), meskipun dengan resiko sejarah harus kehilangan fungsi sosio-kulturalnya. Fenomena itu tidak hanya terjadi di lingkup penulisan sejarah, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Barat menjadi guru kehidupan bangsa Indonesia. Narasi baru tersebut menjadi dominan pada masa Orde Baru berkuasa dengan nama pembangunan. Dengan dimotori oleh para ilmuwan lulusan Berkeley, masa depan bangsa Indonesia ditentukan dengan perhitungan-perhitungan ilmiah. Penentuan masa depan juga terjadi pada kehidupan batiniah bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan bahwa seluruh lapisan masyarakat dengan “demokratis” diminta untuk memilih satu diantara 5 agama resmi.

Dua jenis narasi besar yang pernah berjaya pada masa pra kemerdekaan, memasuki relung kehidupan masyarakat Yogyakarta. Simbol-simbol baru diproduksi dengan ideologi “perubahan”, sehingga berdampak memutus ingatan kolektif masyarakat tentang masa lampainya. Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah keutamaan hidup yang sebelumnya diletakkan pada aspek moral, berubah menjadi diletakkan pada aspek material. Orang akan menjadi dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat apabila memiliki harta (kaya). Simbol baru itu mendorong masyarakat untuk berlomba mengumpulkan materi dengan mengabaikan moral apabila diperlukan.

Seiring dengan itu Kraton, yang pada masa lampau menjadi sumber inspirasi moral masyarakat Yogyakarta, ikut berubah. Wacana pembangunan Mall dan parkir bawah tanah di alun-alun utara mengindikasikan bahwa nilai materi menjadi pertimbangan yang cukup penting, untuk tidak mengatakan dominan, telah merasuki konstruk pikir para pemimpin Yogyakarta. Dalam berbagai kesempatan, Sultan HB X menyatakan bahwa kraton adalah seperti rumah tangga pada umumnya.<sup>16</sup> Pernyataan itu secara simbolik hendak menyampaikan pesan bahwa sudah seharusnya masyarakat memberi kepada kraton hak dan kesempatan yang sama seperti rumah tangga biasa. Kesederajadan itu tentu saja termasuk hak untuk menguasai dan mengelola tanah Sultan Ground yang selama ini “diserobot” rakyat untuk kemudian digunakan mencari keuntungan ekonomis bagi kraton.

Permasalahan ini menjadikan Kraton memperoleh sorotan tajam, baik dari masyarakat Yogyakarta maupun daerah lain. Masyarakat Yogyakarta tidak rela Kraton sebagai simbol identitas kejawaan berubah, seperti ternarasikan oleh S. Nugroho pada situs pemerintah kota:

Ide parkir bawah tanah sebetulnya merupakan suatu hal yang biasa di jaman kini, tetapi menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika ide itu akan diterapkan pada alun-alun utara Jogja. Argumen yang dikemukakan oleh Pemkot memang sangat logis karena Jogja memang membutuhkan fasilitas parkir guna mendukung pembangunan malioboro sebagai kawasan pedestrian. Disamping itu masalah parkir bis pariwisata yang selama ini menjejali alun-alun utara juga akan terselesaikan melalui fasilitas itu. Timbul pertanyaan: “apakah pembangunan harus selalu memihak kepada kepentingan-kepentingan ekonomi”? Bagaimana dengan suara hati

---

<sup>16</sup> *Kompas*, 16 Februari 2006.

nurani penduduk asli Jogja yang tentu saja tidak ikhlas bila melihat alun-alun utara sebagai kawasan cagar budaya dimodifikasi sedemikian rupa. Meskipun secara fisik tidak terjadi perubahan apapun pada permukaan atas, tetap saja akan dianggap sebagai sebuah bentuk “pencemaran budaya”.

Sebaliknya masyarakat luar Yogyakarta mempertanyakan relevansi keistimewaan Yogyakarta yang menempatkan Sultan sebagai gubernur DIY di tengah arus demokratisasi dewasa ini.

#### **F. Penutup**

Yogyakarta yang pada masa lampau pernah menjadi pusat pemerintahan Mataram dan dewasa ini menjadi Kasultanan merupakan simbol perjuangan untuk mempertahankan identitas kejawaan yang berbasis pada nilai kekerabatan dan penghormatan pada orang tua. Narasi kontinuitas identitas kejawaan menjadi berbentuk perlawanan ketika eksistensinya merasa terancam oleh tekanan narasi lain yang dipahami hendak menghancurkannya. Kekuatan Islam di jaman Mataram awal dan kekuatan VOC di jaman Kasultanan Yogyakarta dipahami sebagai ancaman yang serius terhadap kontinuitas identitas kejawaan. Produksi narasi tersebut melahirkan Yogyakarta memperoleh dua julukan sekaligus, yaitu kota budaya dan kota perjuangan.

Narasi kontinuitas tampaknya telah diganti menjadi narasi perubahan akhir-akhir ini. Yogyakarta tidak lagi memperlihatkan kegigihannya untuk menghidupi identitas kejawaan, seperti tersimbolkan pada wacana pembangunan Mall dan tempat parkir bawah tanah. Realitas ini tentu sangat bernilai apabila dijadikan bahan refleksi bagi semua pihak guna mengembangkan Yogyakarta yang lebih baik.

## **Etika Politik Dan Kekuasaan Di Bidang Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Y.B. Adimassana**

**FKIP - Universitas Sanata Dharma**

### **PENDAHULUAN**

Pada awal tahun 80an barangkali kita masih ingat akan peristiwa “petrus” (penembakan misterius) terhadap para gali dan residivis yang tanpa proses pengadilan divonis hukuman mati dengan ditembak langsung memakai senapan berperedam secara sembunyi-sembunyi oleh aparat. Sebelumnya, pada tahun 65an pernah pula terjadi tragedi berdarah terhadap para anggota PKI di seluruh Indonesia yang dibantai tanpa proses pengadilan yang wajar. Itu sekelumit contoh kebijakan politik di bidang keamanan (polkam) - sebagaimana dijalankan oleh kekuasaan - yang tidak sejalan dengan prinsip etika. Bagaimana halnya dengan etika politik kekuasaan di bidang pendidikan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

Yogyakarta pernah tenar sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Disebut kota pendidikan karena terdapat universitas besar Gajah Mada dan lebih dari 40 perguruan tinggi lain. Disebut kota kebudayaan karena seluruh kota menyediakan tempat untuk eksposisi budaya, dari seni pentas, seni lukis, kerajinan batik, kulit, ukir, hingga seni jalanan para pengamen, sehingga jalan Malioboro menjadi terkenal. Ada ruang publik untuk pentas kebudayaan bagi rakyat: alun-alun, sasana hinggil, gedung Purna Budaya, Bentara Budaya, panggung Ramayana, panggung terbuka di depan benteng Vredeburg, dan lain-lain, di samping ada pula museum kebudayaan Sono Budoyo. Tetapi, unsur-unsur tersebut, yang dahulu mampu mengangkat nama Yogyakarta ke ketenaran, dewasa ini tampaknya sudah tidak ada apa-apanya lagi. Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya telah